KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAMBANG SOETJAHJO**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Maret 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MOH. MAHFUD MD	**BAMBANG SOETJAHJO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Tahun Anggaran : **2020**

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	(2)	(3)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.	65 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.	90%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti	60%
2. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
3. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	BB
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	20
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	4

Jumlah Anggaran:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Rp 16.339.445.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Lima Ribu Rupiah).

Jakarta, 13 Maret 2020

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Moh. Mahfud MD

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Bambang Soetjahjo

MANUAL INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
TAHUN 2020

Sasaran Strategis 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarkat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.
Definisi	1. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang dimana target pada tahun 2020 sebesar dan pada tahun 2024 sebesar 37,80, dalam gambaran tingkat persentase perbandingan adalah antara jumlah pelaku tindak terorisme dibandingkan dengan jumlah penduduk di per wilayah/daerah tersebut. Hal ini dicapai dengan dilaksanakannya dengan peningkatan pencegahan penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme 2. Indeks Risiko Terorisme (Target) Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang dimana target pada tahun 2020 sebesar 54,46 dan pada 2024 sebesar 54,00 gambaran jumlah potensi daerah yang menjadi sasaran penyerangan terorisme dengan indikator jumlah daerah yang menjadi target dengan jumlah daerah (Provinsi) yang berada saat itu. Hal ini dicapai dengan dilaksanakannya dengan peningkatan pencegahan penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme. 3. Angka Kejadian Konflik Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga

	mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 4. Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 penduduk) Tingkat kriminalitas adalah suatu susunan/tinggi rendah terjadinya tindakan/perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.
Sumber Data	1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 3. Kementerian Dalam Negeri 4. POLRI
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{Capaian\ hasil\ sesuai\ dokumen\ perencanaan\ (1,2,3,4)}{Target\ sesuai\ dokumen\ perencanaan\ (1,2,3,4)}\ x\ 100\ \%$
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional
Cara Menghitung	$\Sigma = \mu\ Presentase\ capaian\ rekom\ kebijakan\ bidang\ Kamtibmas\ sesuai\ dokumen\ perencanaan$
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam

	dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Cara Menghitung	$\Sigma = \mu$ *Presentase capaian rekomendasi kebijakan bidang Kamtibmas yang ditindaklanjuti*
Sasaran Strategis 2	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal
Indikator Kinerja	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus
Definisi	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal merupakan perintah langsung pimpinan seperti Presiden atau Menteri yang diberikan pada saat tahun berjalan dengan tingkat urgensi yang tinggi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tahun berjalan
Sumber Data	Laporan Pelaksanaan Tugas Khusus
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{Capaian\ penyelesaian\ tugas\ khusus}{Perintah\ tugas\ khusus}\ x\ 100\ \%$
Sasaran Strategis 3	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal
Indikator Kinerja 1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja

	4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data	Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Esclon I, Kategori Penilaian : 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Definisi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidkoor Kamtibmas, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penguatan Tata Laksana 5. Penguatan Pengawasan 6. Penataan Sistem Manajemen SDM 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualiatas Pelayanan Publik
Sumber Data	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidkoor Kominfotur
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek 8 area perubahan. Skala nilai 0 – 23,5.

Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi	Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan
Sumber Data	Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja
Cara Menghitung	Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu : 1. 50 poin untuk unsur perencanaan 2. 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan
Indikator Kinerja 4	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Eselon I adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasaan stakeholders dan Pejabat di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas terhadap hasil pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun pelayanan pada tata usaha dan umum
Sumber Data	Hasil survey kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas kepada stakeholders dan Pejabat di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{Indeks\ Pada\ Pelayanan\ Program\ \&\ Evaluasi + Indeks\ Pada\ Pelayanan\ Tata\ Usaha\ \&\ Umum}{2}$

Jakarta, Maret 2020

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Bambang Soetjahjo